PERUBAHAN APBD 2020 MULAI DIBAHAS

PAD Pemkot Berkurang Rp 258 Miliar

YOGYA (KR) - Sesuai prediksi sebelumnya, pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogya. Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2020, tercatat penurunan PAD mencapai Rp 258 miliar. Akibatnya, belanja daerah juga harus disesuaikan.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, menjelaskan dalam struktur APBD 2020 total PAD diproyeksikan mencapai Rp 671,7 miliar. Akan tetapi terjadi bencana non alam berupa pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan pada perekonomian nasional dan daerah.

"Sampai pertengahan tahun 2020 perkembangan perekonomian global, nasional dan daerah belum menunjukkan ada perbaikan. Hal ini tentu berpengaruh pada perkembangan perekonomian kota maupun DIY secara umum," urainya ketika menyampaikan KUPA 2020 dalam sidang paripurna di dewan, Kamis (6/8).

Oleh karena itu proyeksi PAD disesuaikan dengan realistis menjadi Rp 413,3 miliar atau selisih Rp 258 miliar dari sebelumnya. Sebagian PAD tersebut disumbang dari pajak daerah yang juga diproyeksikan menurun hingga 47,93 persen.

Haryadi menambahkan, aktivitas perekonomian Kota Yogya yang didorong oleh sektor pariwisata dan pendidikan mengakibatkan sektor lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan yang cukup dalam. Penurunan itu pada akhirnya memberikan kontribusi negatif bagi pendapatan asli daerah.

"Tetapi secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogya masih bertumpu pada dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemkot Yogya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat," akunya.

Sementara terkait dengan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Haryadi mengaku sudah menyiapkan berbagai skema. Di antaranya menyempurnakan dan memberlakukan perda terkait pendapatan daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Potensi sumber PAD yang masih memungkinkan juga akan dioptimalkan. Di samping itu, upaya pendekatan ke pemerintah pusat akan digencarkan agar bisa mendapatkan porsi dana perimbangan yang lebih besar.

Meski secara umum terjadi penurunan pendapatan, namun terdapat satu sektor belanja yang harus dinaikkan secara drastis. Yakni pada sektor belanja tidak terduga yang mulanya dialokasikan Rp 3,5 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 174,2 miliar. Besarnya kebutuhan belanja tersebut terutama untuk mempercepat penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi serta jaring pengaman sosial akibat dampak pandemi Covid-19. "Tentunya kita semua berharap kondisi ini segera berlalu dan kembali pulih bahkan menjadi lebih kuat. Sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan," tandasnya. **(Dhi)-f**

JELANG MUSDA PARTAI GOLKAR

12 PK Tuntut Pengembalian Cap

YOGYA (KR) - Sebanyak 12 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kota Yogyakarta, mengadakan aksi keprihatinan di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Kota Yogyakarta, Baciro Gondokusuman Yogyakarta, Kamis (6/8) dini hari.

"Ada dua PK yang tidak turut bergabung, yakni Mergangsan dan Kotagede. Melalui aksi ini intinya kami menanyakan pengambilan cap atau stempel PK Kota Yogyakarta tanpa ada berita acara dan belum dikembalikan hingga saat ini," jelas koordinator aksi yang juga Ketua PK Partai Golkar Kraton, Yugo Saputro kepada KR di sela aksi.

Menurut Yugo, pengecekan cap jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Yogyakarta sudah menjadi hal wajar. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi cap atau stempel, sehingga ketika ada yang rusak bisa langsung diperbaiki.

"Biasanya selesai dicek langsung dikembalikan. Tapi ini kenyataannya cap justru diminta. Dengan kondisi seperti ini jelas ada kevakuman kepengurusan tingkat kecamatan. Padahal organisasi politik tidak boleh ada kevakuman terlalu lama karena situasi ini sudah sebulan lebih. Apalagi ini akan ada Musda tingkat Kota Yogyakarta yang digelar akhir Agustus nanti," sebutnya.

KR-Febriyanto

Jajaran 12 PK Partai Golkar Kota Yogyakarta mengadakan aksi keprihatinan

Sebab itulah pihaknya menuntut agar cap tersebut segera dikembalikan. Jika tidak, dikhawatirkan tidak akan ada peserta Musda. Padahal untuk mencapai kuorum harus diikuti 2/3 suara PK di wilayah Kota Yogyakarta.

"Karena tidak mungkin ada Plt. Sebab kepengurusan PK saat ini keberadaannya masih diakui Pimpinan Kelurahan (PL) dibuktikan dengan pernyataan dan tanda tangan resmi. Pada Juklak Peralihan Pasal 151 DPP Partai Golkar disebutkan apabila masa jabatan ketua mulai tingkat provinsi sampai kecamatan masa jabatannya habis, maka dengan otomatis diperpanjang," ucap Yugo.

Dikatakan Yugo, pihaknya sempat menanyakan keberadaan cap tersebut. Namun dari pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta hanya menjawab agar tidak membuat ontran-ontran menjelang Musda. "Dari kondisi ini kami menilai ada indikasi penggiringan ke salah satu kandidat pada Musda nanti. Karena itu kami menuntut pengembalian cap dan hak-hak agar 2/3 suara PK bisa terpenuhi. Jika tidak, maka berarti Musda nanti tidak demokratis," tegasnya. **(Feb)-f**

SENGKARUT PENYALURAN BANSOS DI DIY

Paling Banyak Kasus Tidak Tepat Sasaran

YOGYA (KR) - Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (Idea) Yogyakarta melakukan pemantauan penyaluran Bansos Covid-19 di DIY. Selama melakukan pemantauan, terhitung sejak pembukaan posko aduan pada Selasa 4 Juni 2020, Idea memiliki beberapa temuan terkait sengkarut penyaluran bansos tersebut.

Peneliti Idea Yogyakarta, Ahmad Haedar mengatakan, menurut data yang dihimpun Idea dari aduan warga, penelusuran media dan dokumen dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY, setidaknya ditemukan 53 kasus yang berhubungan langsung dengan penyaluran program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dari 53 temuan tersebut, kasus paling banyak ialah tidak tepat sasaran dengan jumlah temuan sebanyak 45 kasus, transparansi data ada 3 kasus. Selebihnya terdapat temuan permasalahan berupa pemotongan bantuan, penggelapan, dan penyaluran ganda, masing-masing 1 kasus.

"Ada 2 kasus lainnya yang belum terverifikasi," terang Haedar dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (6/8).

Sedangkan dari sisi sebaran wilayah, daerah paling banyak terjadi kasus ialah Kabupaten Bantul dengan jumlah temuan 33 kasus, 7 kasus di Sleman, 4 kasus di Kota Yogyakarta, 5 kasus di Gunungkidul, 1 kasus di Kulonprogo dan 3 kasus di DIY.

Menurut Haedar, tingginya kasus tidak tepat sasaran dalam penyaluran Bansos Covid-19, setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, perbedaan metode pendataan.

Dijelaskan Haedar, dalam jenis bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) metode pendataan berbasis rumah tangga, sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) berbasis kepada warga terdampak.

"Perbedaan metode pendataan berdampak pada adanya warga yang menerima bantuan ganda, sedangkan di sisi yang lain masih ada warga yang seharusnya berhak menerima namun tidak menerima," tuturnya.

Kedua, persoalan tata kala penyaluran. Menurut Haedar, pemerintah belum memiliki peraturan mengenai urutan penyaluran bantuan kepada warga yang berhak menerima. Sedangkan jenis program bantuan sosial memiliki banyak jenis yang disalurkan pada periode waktu yang sama. Hal ini berdampak pada dua jenis bantuan yang berbeda disalurkan dalam waktu yang bersamaan dengan penerima manfaat yang sama pula.

Ketiga, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak diupdate. Dari hasil penelusuran lapangan, DTKS yang dipakai pemerintah ternyata menggunakan data tahun 2015.

Sedangkan kondisi sosial ekonomi warga terus mengalami perubahan. Kendati pemerintah desa dianjurkan untuk melakukan verifikasi DTKS, namun hal tersebut ternyata tidak menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini terbukti dari adanya kasus yang muncul, misalnya warga yang saat ini masuk ke dalam DTKS namun kondisi perekonomian keluarga sudah relatif sejahtera. **(Dev)-f**

USULAN DANA DARURAT PENDIDIKAN

Harus Diimbangi Pemerataan Kualitas

YOGYA (KR) - Sikap Komisi X DPR RI yang mendesak Kemendikbud untuk mengajukan dana darurat pendidikan, menyusul kompleksitas masalah pendidikan selama masa pandemi, sebetulnya cukup bagus. Meski begitu alangkah baiknya jika semua itu diimbangi dengan tindakan nyata dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan. Dengan begitu akses pembelajaran dapat dirasakan oleh semua siswa di seluruh pelosok Indonesia.

"Sebetulnya usulan dari Komisi X DPR RI agar Kemendikbud mengajukan dana darurat pendidikan, boleh-boleh saja. Kendati demikian saya berharap semua itu bisa diimbangi dengan upaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Untuk itu saya berharap agar setiap pemangku amanah di negeri ini mampu memberikan peran agar kualitas bangsa Indonesia bisa lebih baik dari hari kemarin," kata pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Dr Ariswan MSi di Yogyakarta, Kamis (6/8).

Ariswan mengatakan, Komisi X DPR RI idealnya bukan hanya pada tataran mendesak Kemendikbud terkait dana darurat. Tetapi sesuai kewenangannya, mewujudkan semua elemen negara yang memiliki fasilitas untuk memberikan solusi pada pemerataan akses pembelajaran bagi setiap peserta didik. Dengan begitu persoalan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi persoalan Kemendikbud. Karena jika hal itu terjadi ujungnya hanya menjadi persoalan sekolah atau guru.

"Kita sangat paham dalam keadaan normal saja pendidikan kita terseok-seok untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Apalagi di masa pandemi ini. Namun kenapa para pemimpin belum melihat persoalan ini menjadi persoalan yang amat sangat penting dan berusaha untuk diselesaikan dengan sebaik- baiknya," pungkasnya. **(Ria)-f**

MAKLUMAT PELAYANAN POLRESTA YOGYAKARTA

Siap Layani Pemohon SIM Secara Optimal

YOGYA (KR) - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Yogyakarta terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam hal pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelayanan kepada masyarakat diberikan mengacu pada standar profesional, modern dan terpercaya (Promoter) yang dicanangkan Kapolri. Prinsip utama yang diterapkan adalah 'kepuasan masyarakat adalah wujud dari pelayanan polisi'.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta Polda DIY AKP Imam Bukhori SIK didampingi Kanit Regident AKP Wartono, Kamis (6/8) menjelaskan, dengan selesainya Operasi Patuh Progo 2020, diharapkan masyarakat tetap memperhatikan masalah ketertiban lalu lintas (tiblantas). Terkait hal itu, pihak Satlantas Polresta Yogyakarta akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang mengajukan permohonan baru maupun perpanjangan SIM.

Mengenai sistem mekanisme dan prosedur permohonan SIM Baru, Imam Bukhori menyampaikan pemohon harus datang sendiri mengisi formulir dan menyerahkan struke pembayaran biaya SIM melalui BRI/ATM ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan. Registrasi identitas pemohon SIM dilakukan melalui sistem komputerisasi, termasuk saat harus pemotretan.

"Setiap pemohon SIM baru harus menjalani ujian teori dan praktik," jelas Imam Bukhori. Sedangkan perpanjangan SIM, tidak menjalani ujian teori dan praktik. Perlu ditegaskan pula, bahwa keterlambatan memperpanjang masa berlaku SIM, pemilik harus memulai sebagai pemohon baru. Terkait hal itu, Imam Bukhori mengimbau masyarakat memperhatikan masalah itu.

Mengenai cek kesehatan, dijelaskan setiap pemohon SIM baru dan perpanjangan, harus menjalani cek kesehatan fisik dan cek kesehatan jiwa (psikologi). Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik SIM benar-benar memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan. Semua syarat terkait permohonan SIM harus dipenuhi, termasuk klasifikasi umur. Untuk mendapatkan SIM A dan C (umur 17 tahun), SIM B1 (20 tahun), SIM B2 (21 tahun), SIM A Umum (20 tahun), SIM B1 Umum (22 tahun), dan SIM B2 Umum (23 tahun).

Syarat administrasi yang juga harus dipenuhi adalah mengenai KTP asli yang sah, foto copy KTP (2), surat keterangan sehat, dan surat lulus tes psikologi.

Imam Bukhori menyampaikan untuk pemohon peningkatan SIM, pemohon harus menyertakan surat keterangan uji klinik pengemudi (SKUKP) yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda DIY. Apa yang dimaksudkan dalam pelayanan tersebut, menurut Imam Bukhori merupakan pengejawantahan 'Maklumat Pelayanan' Polresta Yogyakarta, di antaranya menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

"Kami siap melayani masyarakat secara profesional," ujar Imam Bukhori. **(Hrd)-f**

PEMBANGUNAN TAMAN PINTAR II DILANJUTKAN

Targetkan 2021 Bisa Dinikmati Terbatas

YOGYA (KR) - Pembangunan Taman Pintar II yang berada di Jalan Tegalturi Giwangan akan dilanjutkan. Ditargetkan pada tahun 2021 mendatang, hasilnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat meski dalam bentuk layanan terbatas.

Saat terjadi pandemi virus Korona, sempat terjadi penundaan pekerjaan akibat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat belum bisa direalisasikan. "Ada banyak tahapan pembangunan dan mengandalkan DAK. Kebetulan ada program yang masuk dalam dana cadangan dari Kementerian Pariwisata, sehingga prosesnya bisa dilanjutkan," jelas Kepala Bidang Taman Pintar Yogyakarta Afia Rosdiana, Kamis (6/8).

Akan tetapi dari empat program kegiatan untuk mendukung pengembangan embung yang sempat diusulkan pada tahun ini, hanya separuhnya yang dapat direalisasikan yakni pembangunan toilet senilai Rp 562 juta dan jalur pedestrian Rp 3,5 miliar. Keduanya sudah diajukan dalam proses lelang secara elektronik. Sedangkan dua kegiatan lain yakni pembangunan musala dan penerangan, akan diajukan kembali tahun depan. "Harapan kami akhir Agustus sudah ada pemenangnya dan September mulai dikerjakan. Sehingga tahun depan sudah bisa dinikmati meski terbatas," imbuhnya.

Afia menjelaskan, khusus untuk jalur pedestrian yang mengelilingi embung juga difungsikan sebagai *jogging track*. Sehingga jika fasilitas tersebut sudah terbangun maka layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi sifat layanan masih terbatas karena gedung lain yang masuk dalam perencanaan secara utuh sesuai masterplan belum terbangun.

Saat ini Embung Giwangan sudah berhasil terbangun dengan total area 1,1 hektare dengan panjang 340 meter. Embung itu menjadi bagian dalam pengembangan Taman Pintar II yang totalnya mencapai 3,4 hektare. Total kebutuhan dana untuk pembangunan mencapai Rp 525 miliar yang dilakukan secara bertahap. Sebagian besar kebutuhan dana untuk mengisi konten wahana Taman Pintar II yang mengedepankan edukasi konservasi air. "Harapan kami nanti menjadi area terbuka. Tahapan pembangunan bisa berlanjut namun secara terbatas sudah bisa dinikmati oleh masyarakat," tandasnya. **(Dhi)-f**